

Budaya Politik Pemuda Batak di Jl. Taud Siderojo Kab. Deli Serdang (Studi terhadap Partisipasi Politik pada PILPRES 2024)

Jekson Saragih¹, Gadis Prasiska Sembiring², Ivana Theo Philia³, Laras Sati Sintania⁴,
Nazlah Aulia⁵, Reylan Silverius Sinaga⁶, Salwa Andini⁷, Prayetno Prayetno⁸

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Korespondensi Penulis : jeksonsumbayak28@gmail.com

Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

Abstract

In Indonesia, ethnic and cultural diversity provides its own color in the dynamics of political participation, including the Batak tribe which has unique cultural and social characteristics. Jl. Taud Siderojo in Deli Serdang Regency is one of the areas inhabited by the Batak community. The Batak people are famous for their spirit of togetherness (dalihan na tolu), courage and openness in expressing opinions. These cultural values are very influential in various aspects of life, including politics. Batak youth in this region are not only the successors of tradition and culture, but also important actors in local and national political processes.

Keywords: Political Culture, Batak Youth, Presidential Election

Abstrak

Di Indonesia, keberagaman etnis dan budaya memberikan warna tersendiri dalam dinamika partisipasi politik, termasuk di antaranya suku Batak yang memiliki karakteristik budaya dan sosial yang unik. Jl. Taud Siderojo di Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu wilayah yang dihuni oleh komunitas Batak. Masyarakat Batak terkenal dengan semangat kebersamaan (dalihan na tolu), keberanian, dan keterbukaan dalam menyampaikan pendapat. Nilai-nilai budaya ini sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam politik. Pemuda Batak di wilayah ini tidak hanya menjadi penerus tradisi dan budaya, tetapi juga aktor penting dalam proses politik lokal maupun nasional.

Kata Kunci : Budaya Politik, Pemuda Batak, PILPRES

LATAR BELAKANG

Budaya politik adalah pola perilaku, orientasi, dan sikap individu serta kelompok masyarakat terhadap sistem politik dan proses politik dalam suatu negara. Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik (*Kantaprawira, 2006*). Budaya politik mencerminkan bagaimana masyarakat memahami, mengevaluasi, dan berinteraksi dengan institusi politik, serta bagaimana mereka berpartisipasi dalam aktivitas politik. Budaya Politik salah satunya ialah pemilihan presiden. Pemilihan Umum Presiden (PILPRES) merupakan salah satu wujud konkret dari praktik demokrasi di Indonesia. Partisipasi politik masyarakat dalam PILPRES menjadi indikator penting bagi kesehatan demokrasi sebuah negara. Dalam konteks ini, pemuda memegang peranan strategis karena mereka merupakan generasi penerus yang menentukan arah masa depan bangsa.

Di Indonesia, keberagaman etnis dan budaya memberikan warna tersendiri dalam dinamika partisipasi politik, termasuk di antaranya suku Batak yang memiliki karakteristik budaya dan sosial yang unik. Jl. Taud Siderojo di Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu wilayah yang dihuni oleh komunitas Batak. Masyarakat Batak terkenal dengan semangat kebersamaan (dalihan na tolu), keberanian, dan keterbukaan dalam menyampaikan pendapat. Nilai-nilai budaya ini sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam politik. Pemuda Batak di wilayah ini tidak hanya menjadi penerus tradisi dan budaya, tetapi juga aktor penting dalam proses politik lokal maupun nasional.

Studi tentang budaya politik pemuda Batak di Jl. Taud Siderojo menjadi relevan untuk memahami bagaimana mereka memandang dan berpartisipasi dalam PILPRES 2024. Partisipasi politik tidak hanya dilihat dari aspek kehadiran dalam pemungutan suara, tetapi juga meliputi keterlibatan dalam kampanye, diskusi politik, dan kegiatan sosialisasi pemilu. Selain itu, penting untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi mereka, seperti pendidikan politik, media sosial, serta pengaruh tokoh masyarakat dan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana budaya dan nilai-nilai tradisional Batak mempengaruhi sikap dan partisipasi politik pemuda di Jl. Taud Siderojo. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan partisipasi politik yang lebih inklusif dan representatif, serta memperkaya wacana tentang hubungan antara budaya lokal dan partisipasi politik di Indonesia

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran pemuda Batak dalam konteks politik lokal dan nasional, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung peningkatan partisipasi politik mereka. Dengan demikian, studi ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi akademik, tetapi juga sebagai alat untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih baik dalam rangka memperkuat demokrasi di Indonesia.

KAJIAN TEORI

A. Budaya Politik dalam Konteks Pemilihan Umum

Budaya politik dalam konteks pemilihan umum adalah lanskap yang kompleks yang mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, dan praktik politik suatu masyarakat dalam proses demokrasi. Ini mencakup berbagai aspek yang memengaruhi perilaku politik individu dan kelompok selama periode pemilihan umum. Pertama-tama, budaya politik mencakup nilai-nilai dasar yang membentuk fondasi pemahaman masyarakat tentang politik. Nilai-nilai seperti demokrasi, keadilan, kebebasan, dan partisipasi politik adalah elemen kunci

dalam budaya politik yang demokratis. Persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai ini memengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam pemilihan umum. Norma-norma politik juga merupakan bagian integral dari budaya politik. Norma-norma ini mencakup aturan informal yang mengatur interaksi politik, seperti kepatuhan pada hukum, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, dan toleransi politik. Pengetahuan dan kepatuhan terhadap norma-norma ini membentuk lingkungan politik yang stabil dan beradab. Keyakinan politik individu dan kelompok juga menjadi bagian penting dari budaya politik. Keyakinan ini mencakup pandangan tentang peran pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, serta harapan terhadap pemimpin dan institusi politik. Keyakinan politik dapat membentuk preferensi politik dan keputusan saat memilih di dalam pemilihan umum. Tradisi politik, baik yang bersifat formal maupun informal, juga membentuk bagian dari budaya politik. Tradisi ini mencakup praktik politik yang telah lama berlangsung dalam masyarakat, seperti cara-cara kampanye, pemilihan, dan pengambilan keputusan politik. Pengaruh tradisi politik dapat terlihat dalam orientasi politik individu dan kelompok serta dalam pola dukungan terhadap partai politik dan calon pemimpin.

Selain itu, budaya politik mencakup gaya komunikasi politik yang digunakan dalam pemilihan umum. Gaya komunikasi ini meliputi media yang digunakan, bahasa yang digunakan dalam kampanye politik, serta strategi komunikasi yang dipilih oleh para kandidat dan partai politik. Gaya komunikasi politik yang efektif dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon dan isu-isu politik yang dipertaruhkan dalam pemilihan umum. Secara keseluruhan, budaya politik dalam konteks pemilihan umum mencerminkan kompleksitas dinamika politik dalam suatu masyarakat. Memahami budaya politik ini penting untuk merancang strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi politik, memperkuat demokrasi, dan memastikan pemilihan umum yang adil dan transparan.

B. Konsep dan Jenis Partisipasi Politik

a. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik warga negara tampak dalam aktivitas politik. Aktivitas-aktivitas politik tersebut dapat berupa keikutsertaan warganegara dalam proses pembuatan keputusan politik, ikut memberikan suara dalam pemilu, dan ikut menduduki jabatan-jabatan baik politik maupun pemerintahan. Adapun bentuk partisipasi politik menurut partisipasi politik masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Electroral activity, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan.
2. Lobbying, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu.
3. Organizational activity, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa.
4. Contacting, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya.
5. Violence, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan, dan pengrusakan

b. Jenis-Jenis Partisipasi Politik

1. Partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Partisipasi politik spector, orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Partisipasi politik gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
4. Partisipasi politik pengritik, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. : 1) Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. 2) Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. 3) Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

c. Faktor-Faktor Yang Menentukan Partisipasi Politik Masyarakat

1. Adanya kebebasan berkompetisi disegala bidang termasuk dibidang politik,
2. Adanya kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka,
3. Adanya keleluasaan untuk mengorganisasi diri, sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur,

4. Adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat yang berupa kekayaan dalam masyarakat,

5. Adanya distribusi kekuasaan dikalangan masyarakat sehingga tercipta suatu perimbangan kekuatan.

Faktor lain yang menentukan partisipasi politik adalah:

1. Tingkat Pengetahuan. Dengan pengetahuan yang baik, tentunya orang akan lebih mudah memahami pentingnya politik dan ikut serta didalamnya. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki pengetahuan yang sedikit tentang politik, maka ia akan acuh terhadap politik,

2. Pekerjaan Masyarakat. Biasanya orang dengan jenis pekerjaan tertentu membuat mereka dapat menjadi lebih peduli terhadap politik, atau malah menjadi lebih jauh dari partisipasi politik. Misalnya, seorang guru umumnya memiliki tingkat kepedulian terhadap politik dibandingkan pemulung,

3. Tingkat Pendidikan. Bagi pemilih yang buta huruf, akan sangat sulit baginya ketika mengenali calon pemimpin atau wakil rakyat ketika pemungutan suara berlangsung,

4. Peran Aparat Pemerintah. Mereka seharusnya memberikan edukasi pada masyarakat terkait politik dan mempermudah akses terhadap pengetahuan atas politik tersebut,

5. Pengaruh Kaum Intelektual. Banyak diantara kaum intelektual bidang politik yang menyampaikan opininya terhadap suatu permasalahan politik tertentu di berbagai media. Bagi konsumen media, hal tersebut bisa meningkatkan partisipasi politik mereka atau bahkan sebaliknya,

6. Konflik Diantara Para Pemimpin Politik. Para pemimpin politik berlomba untuk mendapatkan dukungan dari rakyat yang sebesar-besarnya. Kader Kader mereka nantinya akan merekrut sebanyak-banyaknya warga Negara untuk memberikan dukungan pada pemimpin mereka. Hal ini tentunya dapat meningkatkan partisipasi politik suatu Negara.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang relevan atau yang sama pada tema penelitian, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian.

Instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrument pengumpulan data merupakan faktor penting demi

keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrument dapat berupa lembar cek pedoman wawancara dan lainnya.

PEMBAHASAN

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil pemerintah. Istilah “partisipasi politik” telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Herbert Mc Closky mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi politik sebagai: “The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy” (Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum). (Herbert McClosky dalam Miriam Budiarjo, 2015:367).

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebuah proses politik yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung atau tidak langsung memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga perwakilan, dengan tujuan membentuk pemerintahan yang sesuai dengan keinginan mayoritas. Pemilu menjadi landasan demokrasi di mana setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan arah kebijakan negara melalui pemilihan para pemimpinnya. Partisipasi politik generasi muda merupakan elemen kritis dalam keberlangsungan demokrasi suatu negara. Pada era globalisasi dan teknologi informasi seperti saat ini, generasi muda memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi politik, namun tingkat partisipasi mereka dalam pemilihan presiden masih menjadi perhatian utama. Seiring dengan Pemilihan Presiden 2024, penting untuk memahami peran pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Generasi muda sering kali dianggap sebagai motor penggerak perubahan dan inovasi dalam suatu masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam proses politik, terutama melalui hak pilih mereka dalam pemilihan presiden. Faktor-faktor seperti ketidakpahaman terhadap sistem politik, kurangnya kepercayaan diri, atau kurangnya pengetahuan politik dapat menjadi penghambat utama dalam partisipasi mereka.

Tahun 2024 menandai hari pemungutan suara dan Pemilihan Umum serentak di Indonesia, sebagaimana diumumkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022. Pemilihan Presiden 2024 tidak hanya menjadi suatu agenda nasional, tetapi juga sebuah peristiwa bersejarah yang mencerminkan praktik demokrasi negara. Dalam perspektif ini, menghadapi pesta demokrasi mendatang, partai politik perlu mengembangkan strategi yang cermat, terutama di tengah kondisi disrupsi digital yang semakin nyata. Upaya menjalankan negara yang demokratis juga tercermin dalam pesan Presiden Joko Widodo saat pelantikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Presiden menekankan pentingnya pendidikan politik masyarakat untuk mencegah terprovokasinya isu politik identitas. Dalam konteks ini, penyusunan strategi partai politik dan penekanan pada pendidikan politik menjadi kunci untuk memastikan keberlangsungan demokrasi yang sehat dan inklusif dalam Pemilihan Presiden 2024. Definisi pemuda dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 adalah warga negara Indonesia (WNI) yang memasuki periode pertumbuhan berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pemuda dalam rentang usia 16-30 tahun sebanyak 64, 92 juta atau sebesar 24% di tahun 2021, angka statistik ini menunjukkan jumlah populasinya lumayan besar, dengan jumlah tersebut pemuda memiliki posisi strategis dalam Pemilu 2024 terutama dalam menciptakan atmosfer kontestasi yang demokratis. Terdapat dua peran politik dapat dilakukan pemuda di Pemilu 2024. Pertama, terlibat kontestasi politik secara langsung menjadi calon anggota legislatif dari pusat sampai daerah. Kedua, menjadi bagian dari kekuatan civil society melakukan pengawasan Pemilu 2024.

Urgensi keterlibatan pemuda dalam politik sangat penting, terlebih berdasarkan data terbaru, jumlah generasi Z (9-24 tahun) dan generasi milenial (25-40 tahun) secara populasi sekitar 53% dari keseluruhan penduduk Indonesia, sementara anggota DPR RI periode 2019-2024 hanya berjumlah 10% memiliki umur dibawah 40 tahun, dengan persentase tersebut dapat dikatakan keterwakilan generasi muda belum optimal. Akan tetapi, selain hal tersebut peran pemuda bisa dilakukan melalui keterlibatan aktif dalam kekuatan civil society untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilu 2024. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemuda memiliki signifikansi yang sebanding dengan peran mereka dalam politik praktis. Pemuda dapat menjadi garda terdepan dalam ekosistem digital, berperan dalam meminimalisir konten-konten politik negatif yang bersifat kebencian terhadap kelompok lain. Melalui inisiatif ruang politik digital, pemuda dapat menyajikan konten politik yang lebih mendidik secara kritis kepada pemilih. Selain itu, partisipasi pemuda dalam mengawasi proses pemilu di Tempat

Pemungutan Suara (TPS), dengan mencatat potensi kecurangan yang mungkin terjadi, dan melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), menjadi kontribusi nyata mereka dalam menjaga integritas demokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan terhadap pemuda batak di jalan Taud Siderejo kab. Deli Serdang terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 dapat di simpulkan tanggapan dari para narasumber yaitu Antusiasme terhadap Pemilu, banyak pemuda Batak di Jalan Taud menunjukkan antusiasme tinggi terhadap Pemilu 2024. Mereka menyadari pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi untuk menentukan masa depan bangsa. Kesadaran Politik: Para pemuda memiliki tingkat kesadaran politik yang cukup baik. Mereka umumnya mengikuti perkembangan politik nasional dan memiliki Harapan terhadap Pemerintah yang Akan Terpilih: Pemuda Batak di jalan taud siderejo berharap pemerintah yang terpilih nanti mampu membawa perubahan positif, terutama dalam hal peningkatan lapangan kerja, pendidikan, dan kesejahteraan umum pemahaman yang cukup tentang kandidat dan partai politik yang akan bertarung.

Keterlibatan generasi muda dalam pengawasan Pemilihan Umum 2024 harus didorong dan diperkuat. Partai politik dan lembaga terkait perlu memberikan dukungan dan pelatihan yang memadai kepada pemuda agar mereka dapat aktif mengawasi proses pemilu, meminimalisir konten politik negatif, dan menciptakan ruang politik digital yang lebih edukatif. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya menjadi pemilih yang terinformasi tetapi juga agen perubahan yang berkontribusi aktif dalam menjaga integritas demokrasi.

Adapun Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik pemuda Batak dalam Pilpres 2024 meliputi:

- Nilai-nilai budaya: Nilai-nilai budaya Batak dapat mendorong partisipasi politik pemuda, seperti rasa tanggung jawab untuk menjaga martabat komunitas dan keinginan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
- Identitas: Identitas sebagai pemuda Batak dapat menjadi sumber kebanggaan dan mendorong partisipasi politik, terutama jika mereka merasa bahwa kandidat tertentu mewakili nilai-nilai dan kepentingan komunitas mereka.
- Struktur sosial: Struktur sosial, seperti hubungan keluarga dan jaringan komunitas, dapat memengaruhi partisipasi politik pemuda. Dukungan dari keluarga dan komunitas dapat mendorong partisipasi politik, sedangkan hambatan sosial dapat menghambat partisipasi.

- Ketersediaan informasi dan edukasi politik: Akses terhadap informasi dan edukasi politik yang berkualitas dapat meningkatkan partisipasi politik pemuda.
- Kepercayaan terhadap sistem politik: Kepercayaan terhadap sistem politik dan proses demokrasi dapat mendorong partisipasi politik pemuda.

Dibalik tingginya antusias pemuda Batak yang mengikuti pemilu 2024, pastinya ada sebagian besar yang melakukan golput atau kurang berpartisipasi dalam kegiatan pemilu. Sehingga kami sebagai penuli memberikan strategi untuk Meningkatkan Partisipasi Politik: Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik pemuda Batak dalam Pilpres 2024 meliputi:

- Meningkatkan edukasi politik: Memberikan edukasi politik kepada pemuda Batak tentang pentingnya partisipasi politik, hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, dan cara menggunakan hak pilih mereka secara bertanggung jawab.
- Melibatkan pemuda dalam proses politik: Melibatkan pemuda Batak dalam proses politik, seperti dalam kampanye dan pengambilan keputusan.
- Membangun platform komunikasi politik: Membangun platform komunikasi politik yang mudah diakses oleh pemuda Batak, seperti media sosial dan website, untuk menyebarkan informasi politik dan memfasilitasi diskusi politik.
- Mendukung kandidat yang pro-pemuda: Mendukung kandidat yang memiliki program dan kebijakan yang berpihak pada pemuda.

Budaya Batak, dengan nilai-nilainya yang kuat tentang kepemimpinan, kolektifitas, dan martabat, memainkan peran penting dalam membentuk budaya politik pemuda Batak di Jl. Taud Siderojo, Deli Serdang. Nilai-nilai ini dapat mendorong partisipasi politik pemuda dalam berbagai bentuk, seperti Partisipasi aktif dalam proses demokrasi, Pemuda Batak didorong untuk terlibat dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum, rapat desa, dan diskusi politik. Kepemimpinan, Pemuda Batak dihormati karena kemampuan kepemimpinan mereka dan diharapkan untuk mengambil peran aktif dalam komunitas dan politik. Kolektifitas, Pemuda Batak memiliki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap komunitas mereka dan termotivasi untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Martabat, Pemuda Batak ingin menjaga martabat komunitas mereka dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam politik untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.

Selain budaya politik, beberapa faktor lain juga dapat memengaruhi partisipasi politik pemuda Batak, seperti:

- Identitas: Identitas sebagai pemuda Batak dapat menjadi sumber kebanggaan dan mendorong partisipasi politik, terutama jika mereka merasa bahwa kandidat tertentu mewakili nilai-nilai dan kepentingan komunitas mereka.
- Struktur sosial: Struktur sosial, seperti hubungan keluarga dan jaringan komunitas, dapat memengaruhi partisipasi politik pemuda. Dukungan dari keluarga dan komunitas dapat mendorong partisipasi politik, sedangkan hambatan sosial dapat menghambat partisipasi.
- Ketersediaan informasi dan edukasi politik: Akses terhadap informasi dan edukasi politik yang berkualitas dapat meningkatkan partisipasi politik pemuda.
- Kepercayaan terhadap sistem politik: Kepercayaan terhadap sistem politik dan proses demokrasi dapat mendorong partisipasi politik pemuda.

Budaya politik pemuda Batak dapat berdampak signifikan pada Pilpres 2024 dalam beberapa hal:

- Mobilisasi pemilih: Pemuda Batak dapat memainkan peran penting dalam memobilisasi pemilih dalam komunitas mereka untuk mendukung kandidat tertentu.
- Kampanye politik: Pemuda Batak dapat terlibat aktif dalam kampanye politik, seperti membantu kandidat dalam menyebarkan informasi dan mendapatkan suara.
- Pemungutan suara: Pemuda Batak diharapkan untuk menggunakan hak pilih mereka secara bertanggung jawab dan memilih kandidat yang mereka yakini dapat membawa perubahan positif bagi bangsa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Budaya politik pemuda Batak di Jl. Taud Siderojo, Deli Serdang, memainkan peran penting dalam membentuk partisipasi politik mereka. Nilai-nilai budaya Batak, seperti kepemimpinan, kolektifitas, dan martabat, dapat mendorong partisipasi politik pemuda. Namun, beberapa faktor lain, seperti identitas, struktur sosial, akses informasi, dan kepercayaan terhadap sistem politik, juga dapat memengaruhi partisipasi politik pemuda.

Pada Pilpres 2024, pemuda Batak dapat memainkan peran penting dalam memobilisasi pemilih, berkampanye untuk kandidat, dan menggunakan hak pilih mereka secara bertanggung jawab. Meskipun terdapat beberapa tantangan, terdapat peluang untuk meningkatkan partisipasi politik pemuda Batak dengan meningkatkan edukasi politik, melibatkan pemuda

dalam proses politik, membangun platform komunikasi politik, dan mendukung kandidat yang pro-pemuda.

B.Saran

Dalam penulisan laporan ini kami sebagai penulis berharap semoga partisipasi pemuda batak dalam mengikuti kegiatan pemilu dan partisipasi politik semakin meningkat. Dan budaya politik yang dapat menurunkan martabat politik dalam hal pemilu di Indonesia, semoga dapat dirubah dan disempurnakan guna mencapai demokrasi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Apter, David E., *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta: LP3ES, 1985. Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia

<http://www.setabasri01.blogspot.com/2009/02/partisipasi-politik.html>, diakses pada 14 November 2014.

Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006, cet. ke-10.

Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Mohtar, Mas' oed dan Andrew MacColin, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.

Ndraha, Taliziduhu, "Teori Budaya Politik, Budaya Politik di Indonesia", dalam <http://www.taliziduhu-updm.blogspot.com/2012/04/teori-budaya-politik-budaya-politik-di.html>, diakses pada 12 November 2014.

Padmodiningrat, Sumaryoto, "Tak Ada Kawan Lawan yang Abadi", dalam *Suara Merdeka*, 12 November 2014. Pustaka Utama, 2008.

Rahman A., H.I., *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Rahman, A. Syahrial, dkk., *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Sjamsuddin, Nazaruddin, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1993.

Winarno, Budi, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2008.